**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI *MANAJEMEN MUTU* DALAM MENINGKATKAN AKREDITASI SEKOLAH PADA MASA PANDEMI COVID 19**

**(Studi pada SMPN 3 Satu Atap Banawa Tengah, dan SMP 11 Satu Atap, Sulawesi Tengah)**

1. **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Eksistensi pendidikan memiliki urgensi yang berbanding lurus dengan kehidupan manusia itu sendiri. Melalui pendidikan manusia mentransfer ilmu pengetahuan, budaya, adat dan berbagai bentuk *scientific heritage* kepada generasi selanjutnya. Pendidikan juga berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia melalui berbagai inovasi dan pengembangan teknologi. Kehidupan manusia akan selalu berkembang dengan berbagai inovasi dalam teknologi sebagai salah satu output pendidikan.

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup dalam kelompok-kelompok yang beragam. Keragaman komunitas masyarakat di dunia ini memiliki ciri khas masing-masing, yang menjadi perbedaan antar kelompok. Keragaman tersebut juga mempengaruhi karakteristik model pendidikan yang berkembang dalam suatu masyarakat. Setiap anak manusia dilahirkan di dalam suatu habitus kebudayaan dalam masyarakat lokalnya. Masyarakat lokal berdasarkan tradisi mempunyai mekanisme di dalam mendidik calon anggotanya[[1]](#footnote-1). Pendidikan pertama kali didapatkan seorang individu dari keluarga, karena keluarga merupakan pranata terkecil dalam masyarakat. Selanjutnya, individu melanjutkan pendidikan dalam masyarakat sebagai bagian dari sebuah komunitas. Keluarga dan masyarakat memiliki tujuan yang sama yakni untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat melalui dunia pendidikan.

Keberagaman masyarakat berakibat pada heterogenitas *need and demand* masyarakat. Hal ini juga berbanding lurus dengan kebutuhan akan pendidikan, tidak terkecuali juga lembaga pendidikan. Pendidikan memerlukan sebuah kelembagaan untuk mengorganisir alur dan corak pendidikan sesuai *need and demand* yang berkembangan di masyarakat. Hal ini secara tidak langsung melatarbelakangi berdirinya berbagai lembaga pendidikan di masyarakat. Lembaga pendidikan di masyarakat merupakan simbol kemapanan sistem pemerintahan pada masyarakat tertentu. Hal yang sama juga berlaku dalam kelompok yang lebih besar, yaitu Negara. Negara dengan peradaban yang tinggi akan selalu ditopang dengan sistem pendidikan yang bonafit dan berkualitas.

Dunia pendidikan di Indonesia sekarang ini mengalami beberapa permasalahan dan krisis seiring dengan munculnya krisis multidimensial bangsa yang belum kunjung terselesaikan. Secara umum krisis pendidikan di Indonesia diklasifikasikan menjadi empat pokok krisis, yaitu pertama, kualitas pendidikan yang masih rendah, kedua, relevansi produk pendidikan yang belum seimbang dengan kebutuhan tenaga kerja, ketiga, elitisme, dan keempat, krisis manajemen sekolah yang belum tertata dengan baik[[2]](#footnote-2). Kompleksitas pendidikan ini menggambarkan bahwa pendidkan itu sebuah upaya serius karena pendidikan melibatkan aspek kognitif, efektif dan ketrampilan yang akan membentuk diri seseorang secara keseluruhan menjadi manusia seutuhnya[[3]](#footnote-3).

Sistem Pendidikan Nasional, sebagai kerangka acuan implementasi pendidikan di Indonesia, memiliki peran sebagai standardisasi minimal lembaga pendidikan yang berkembang saat ini di Indonesia. Sisdiknas merupakan acuan dasar sistem pendidikan yang telah berkembang di berbagai masyarakat, terkait kurikulum, model pendidikan, standar kelembagaan, standar output dan standar guru. Sisdiknas menjadi penting mengingat tanpa standar nasional maka pendidikan di Indonesia akan mengalami ketimpangan luar biasa antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan atau daerah tertinggal. Sisdiknas harus dipahami sebagai standar minimal yang berlaku umum. Terkait dengan itu, pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional berusaha mengontrol mutu output dan kinerja lembaga pendidikan di berbagai daerah dengan menggunakan standar minimal yang dapat diterapkan di daerah-daerah. Setiap lembaga pendidikan memerlukan asesmen yang berguna untuk mengevaluasi kinerja sebuah lembaga pendidikan. Asesmen secara umum bertujuan untuk mengetahui kekurangan yang ada agar dilakukan perbaikan atau pengembangan pada masa yang akan datang.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dilakukan secara massif. Setidaknya dua unsur penting dalam dunia pendidikan mendapat prioritas dari pemerintah, yaitu infrastruktur pendidikan, dan kurikulum pendidikan. Upaya peningkatan infrastruktur pendidikan sudah dimulai sejak tahun 2005 dengan diluncurkannya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)[[4]](#footnote-4). Implementasi dana BOS dilaksanakan pada sekolah dasar dan sekolah menengah.

Pemerintah, secara serius, berusaha meningkatkan mutu output pendidikan di Indonesia. Melalui program pembagian dana bos, pemerintah bertujuan untuk: 1) menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta; 2) menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI); 3) meringankan beban biaya opersional sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Hal tersebut menggambarkan bahwa program BOS bermanfaat pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun swasta. Sekolah program kejar Paket A dan B serta SMP terbuka tidak termasuk dalam sasaran dari PKPS-BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak) bidang pendidikan, karena hampir semua komponen dari ketiga program tersebut dibiayai oleh pemerintah[[5]](#footnote-5).

Dunia pendidikan harus menyiapkan seluruh unsur dalam sistem pendidikan agar tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh perkembangan tersebut. Melalui penerapan dalam bentuk pengawasan sebagai rambu-rambu dan pengendalian secara tepat, tentunya akan berimplikasi pada perbaikan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Perbaikan yang berlangsung terus menerus secara konsisten akan mendorong orientasi pada perubahan untuk memperbaiki secara terus menerus dunia pendidikan. Adanya revolusi informasi dapat menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan karena mungkin kita belum siap menyesuaikan. Sebaliknya, hal ini akan menjadi peluang yang baik bila lembaga pendidikan mampu menyikapi dengan penuh keterbukaan dan berusaha menjadikan pengawasan dan evaluasi melalui akreditasi misalnya dapat ditanggapi secara produktif sebagai penunjang pencapaian mutu pendidikan[[6]](#footnote-6).

Untuk mencapai terselenggaranya pendidikan bermutu, perlunya pengelolaan dan pengendalian instansi pendidikan secara profesional yang juga difokuskan pada akreditasi dan evaluasi. Kedua pilar manajemen ini diharapkan pada akhirnya mampu menghasilkan pendidikan bermutu. Mutu pendidikan itu sendiri merupakan suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara dimana setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Secara luas mutu dapat diartikan sebagai agregat karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan. Karakteristik mutu dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif, dalam pendidikan, yang bermutu adalah suatu keberhasilan proses belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Pelanggan bisa berupa mereka yang langsung menjadi penerima produk dan jasa tersebut atau mereka yang nantinya akan merasakan manfaat produk dan jasa tersebut[[7]](#footnote-7).

Berkaitan dengan kualitas pendidikan, pemerintah juga berupaya membentuk badan akreditasi sebagai alat control kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas lembaga pendidikan melalui standar yang telah ditetapkan melalui peraturan akreditasi. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah[[8]](#footnote-8). Akreditasi sekolah berfungsi: (a) untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah, (b) untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat, dan (c) untuk kepentingan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi[[9]](#footnote-9).

Mengingat fungsi akreditasi yang penting bagi perkembangan lembaga pendidikan, maka sudah seyogyanya setiap lembaga pendidikan berkembang sesuai dengan alur yang telah ditetapkan dalam nilai-nilai akreditasi, karena tidak semua lembaga pendidikan dapat diakreditasi. Setidaknya terdapat beberapa syarat agar sebuah lembaga pendidikan dapat diakreditasi, diantaranya: (a) memiliki surat keputusan kelembagaan (UPT); (b) memiliki siswa pada semua tingkatan; (c) memiliki sarana dan prasarana pendidikan; (d) memiliki tenaga kependidikan; (e) melaksanakan kurikulum nasional; dan (f) telah menamatkan siswa. Setelah memenuhi syarat tersebut, sekolah dapat mengajukan akreditasi dengan mengikuti prosedur sebagai berikut: (a) pengajuan permohonan akreditasi dari sekolah; (b) evaluasi diri oleh sekolah; (c) pengolahan hasil evaluasi diri; (d) visitasi oleh asesor; (e) penetapan hasil akreditasi; (f) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi[[10]](#footnote-10)

Problematika yang muncul berikutnya adalah implementasi standar minimal akreditasi terhadap sekolah-sekolah yang berada di pedesaan, daerah terpencil dan terluar. Masyarakat di daerah terpencil juga membutuhkan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 melalui wajib belajar 9 tahun. Sulawesi Tengah merupakan daerah yang secara demografis terpisahkan dengan pegunungan. Kondisi ini berpengaruh pada karakteristik hunian masyarakat. Masyarakat terbagi menjadi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat pedesaan terbagi lagi menjadi masyarakat desa luar dan masyarakat desa dalam, dimana masyarakat yang tinggal di pedesaan bagian luar pada umumnya memiliki akses transportasi yang sulit. Mereka lebih dikenal dengan masyarakat desa terpencil. Namun demikian, pada umumnya pendidikan juga dilaksanakan dalam komunitas masyarakat terpencil tersebut, meskipun dengan sarana dan prasarana yang sangat minim.

Sekolah biasanya melakukan berbagai persiapan menghadapi akreditasi. Peran kepala sekolah menjadi urgen karena terkait secara langsung dengan manajerial lembaga. Dalam pendidikan, manajemen mutu merupakan hal lazim yang dilaksanakan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Manajemen mutu dalam dunia pendidikan merupakan proses manajerial yang berbasis pada mutu sebuah lembaga pendidikan. Proses ini melibatkan berbagai pihak terkait dengan pendidikan, dengan peningkatan mutu sebagai tujuan akhir. Agar mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanya titik acuan standar). Dalam penelitian ini, kebijakan BANS/M dalam akreditasi di sekolah menjadi acuan standar implementasi manajemen mutu di sekolah.

1. **Ruang lingkup dan batasan penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada sekolah menengah satu atap dengan sekolah dasar yang berlokasi pada wilayah kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah. Lokus penelitian ini terdiri atas dua sekolah, yakni SMPN 3 Satap Banawa Tengah dan SMP Satap 11 Palolo.

Batasan lain yang ditentukan oleh peneliti adalah pada pembahasan manajemen mutu lulusan, mutu pembelajaran, mutu kurikulum, bimbingan dan latihan oleh guru, dan mutu profesionalisme dan kinerja guru. Mutu elemen-elemen tersebut di atas terkait erat dengan mutu pengelolaan, sarana-prasarana, pembiayaan, fasilitas, media, sumber belajar, dan lingkungan sekolah. Keluasan aspek pembahasan manajemen mutu pendidikan tersebut akan membutuhkan waktu panjang dalam penelitian, sehingga peneliti kemudian membatasi pada permasalahan manajemen proses pendidikan di sekolah, terkait dengan kesiapan guru dan proses pelaksanaan pembelajaran. Manajemen proses tersebut kemudian dikaitkan dengan standar nasional pendidikan yang menjadi dasar dalam sebuah akreditasi sekolah, yakni pada aspek standar proses. Terakhir, karena penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemi, maka manajemen proses tersebut juga dibatasi dengan masa pandemi. Dengan kata lain, manajemen proses pendidikan di sekolah satap pada masa pandemi.

1. **RUMUSAN MASALAH**

Peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai acuan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah manajemen proses pendidikan di SMPN 3 Satap Banawa Tengah dan SMPN 11 Satap Palolo pada masa pandemi?
2. Bagaimana korelasi manajemen proses di SMPN 3 Satap Banawa Tengah dan SMPN 11 Satap Palolo dengan akreditasi sekolah?

**TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi manajemen mutu pada aspek proses pembelajaran di SMPN 3 Satap Banawa Tengah dan SMPN 11 Satap Palolo Sulawesi Tengah
2. Menemukan dan mendeskripsikan korelasi antara penerapan manajemen mutu dengan peningkatan nilai akreditasi sekolah
3. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat manajemen mutu di sekolah

**MANFAAT PENELITIAN**

1. Sebagai literatur intelektektual tentang asesmen dan evaluasi proses pembelajaran di sekolah pada masa pandemi
2. Menemukan format ideal dalam supervisi dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan menengah di Sulawesi Tengah
3. Memperkaya literasi tentang perkembangan pendidikan menengah di Sulawesi Tengah
4. Memberikan kontribusi positif dalam perkembangan akademik, terutama pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di PTAIN/PTAI, terutama di Institut Agama Islam Negeri Palu.
5. Mengetahui implementasi manajemen mutu pada sekolah-sekolah terpencil di Sulawesi Tengah

**TAHAPAN PENELITIAN**

1. Tahap Persiapan Penelitian
2. Tahap pelaksanaan Penelitiaan
3. Tahap Penulisan dan verifikasi hasil penelitian

**JADWAL PENELITIAN**

Penelitian ini memerlukan waktu 10 minggu dengan jadwal sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama kegiatan** | **Juni 2021** | **Juli 2021** | **Agustus 2021** |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II |
| 1 | Studi kelayakan/survey lokasi | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pengambilan data  |  | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |
| 3 | Pengolahan data |  |  | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |
| 4 | Kodifikasi hasil penelitian |  |  |  |  |  |  | **√** | **√** |  |  |
| 5 | Seminar hasil penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |
| 6 | Revisi penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** | **√** |
| 7 | Finalisasi laporan penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |

1. HAR. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional; Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural,* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2005), 113. [↑](#footnote-ref-1)
2. HAR. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 150. [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi, (Jakarta: Grasindo, 2003), 6. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan untuk membebaskan biaya operasional pendidikan mencapai Rp 243,28 triliun sepanjang 2005 hingga 2013. <https://www.beritasatu.com/pendidikan/178736-sepanjang-2005-2013-pemerintah-kucurkan-dana-bos-rp-24328-triliun.html>, diakses online pada tanggal 28 Maret 2019. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid.. [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://bapsm-kalbar.or.id/2015/06/peran-akreditasi-sekolahmadrasah-terhadap-peningkatan-mutu-pendidikan/> diakses secara online pada 14 agustus 2019 [↑](#footnote-ref-6)
7. ibid [↑](#footnote-ref-7)
8. Salah satu dasar hukum akreditasi sekolah adalah Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60, Peraturana Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87 dan Surat Keputusan Mendiknas No. 87/U/2002 [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/03/akreditasi-sekolah/> [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid. [↑](#footnote-ref-10)